

**TANDA TERIMA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

Atas Nama : ELDI HARPONI  
NIK : 1113021101730001  
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG  
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG  
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA BANDUNG  
Jabatan : WAKIL KETUA  
Jenis Laporan : Periodik - 2024  
Tanggal Kirim : 2 Januari 2025

**Catatan:**

*Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.*



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : YUDIKATIF

**LEMBAGA** : MAHKAMAH AGUNG

**UNIT KERJA** : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : ELDI HARPONI

2. Jabatan : WAKIL KETUA

3. NHK : 76572

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 18 m<sup>2</sup>/18 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA  
SIJUNJUNG, HASIL SENDIRI, HIBAH TANPA AKTA, Rp.  
550.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 550.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T Tahun 2022,  
HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 5.500.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 16.403.067

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 1.121.903.067

**III. HUTANG** Rp. 761.405.853

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 360.497.214

**Catatan:**

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpnn.kpk.go.id](http://elhkpnn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.